

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

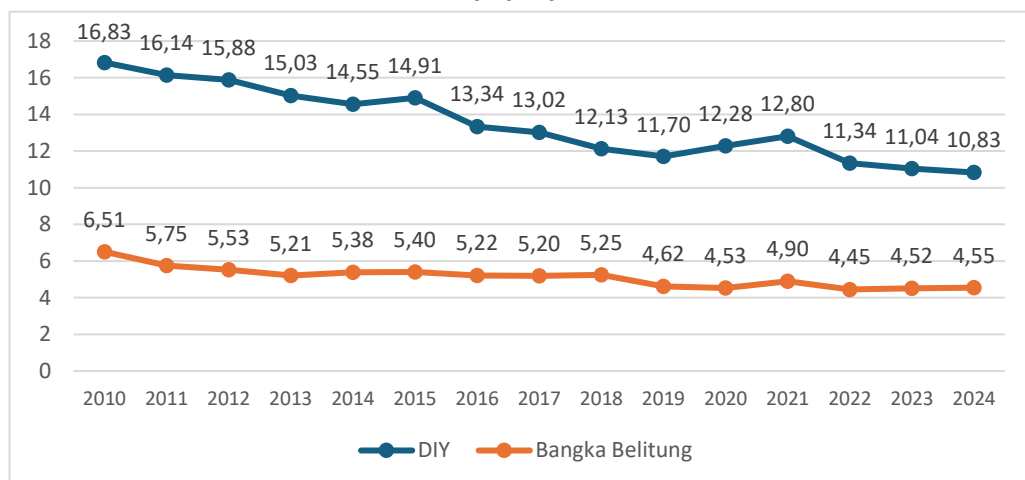
Meskipun Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia, kemiskinan tetap menjadi masalah utama dalam pembangunan negara ini. Fenomena ini juga dikenal sebagai *resource cursed* yaitu kondisi di mana kelimpahan sumber daya alam menyebabkan distribusi manfaat yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan tingginya korupsi sehingga kemiskinan tetap terjadi (Narh, 2025). Menurut World Bank, kemiskinan tetap ada di negara berkembang seperti Indonesia bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena pada suatu daerah tersebut sulit untuk menyalurkan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata (World Bank, 2025).

Berdasarkan data Rasio Gini pada BPS periode 2019–2024 menunjukkan bahwa DIY secara konsisten memiliki Rasio Gini tertinggi, yang berarti distribusi pendapatannya relatif tidak merata meskipun tingkat pendidikannya tinggi. Sebaliknya, Bangka Belitung termasuk provinsi dengan ketimpangan terendah, yang dapat dijelaskan oleh struktur ekonomi yang lebih homogen sehingga distribusi pendapatan cenderung lebih merata. Kemiskinan dalam suatu daerah disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan masyarakatnya. Pasar tenaga kerja berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan dan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan dari pekerjaan. Ketika kesempatan kerja terbatas dan jumlah pencari kerja lebih banyak daripada pekerjaan yang tersedia, pengangguran meningkat.

Masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan akan kehilangan atau tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menurun dan risiko mengalami kemiskinan meningkat (Marshall, 2013).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan aktivitas dan produksi ekonomi suatu daerah. Secara umum, ketika perekonomian berkembang, produksi dan kegiatan usaha meningkat sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut pada akhirnya dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari kemiskinan (Mankiw, 2021). Pendidikan merupakan sebuah modal untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas manusia. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang sehingga membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Dengan meningkatnya pendapatan, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar juga meningkat sehingga kemiskinan dapat berkurang (Becker, 1993).

Grafik 1. 1 Tingkat Kemiskinan DI Yogyakarta dan Bangka Belitung Tahun 2010-2024



Sumber : BPS, 2026 (data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat kemiskinan DI Yogyakarta periode 2010–2014 menunjukkan tren menurun yang relatif konsisten dalam konteks pemulihan pasca krisis keuangan global 2008–2009 yang dipicu krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Pada masa tersebut, pertumbuhan ekonomi DIY berada di kisaran 5% per tahun, disertai penurunan pengangguran dan peningkatan pendidikan, sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja terutama di sektor jasa, perdagangan, dan pendidikan. Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga berperan dalam menekan kerentanan rumah tangga miskin. Namun, pada periode 2014–2015 kemiskinan kembali meningkat akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (dari 5,78% tahun 2013 menjadi 4,79% tahun 2015), kenaikan inflasi pasca reformasi subsidi BBM, serta struktur pasar kerja yang didominasi sektor informal berpendapatan rendah (Bank Indonesia;Kementrian Keuangan Republik Indonesia).

Memasuki periode 2016–2019, kondisi ekonomi kembali stabil dengan inflasi yang lebih terkendali dan aktivitas sektor jasa, perdagangan, pariwisata, serta UMKM yang mulai pulih. Stabilitas ini mendorong perbaikan daya beli dan penurunan kemiskinan secara bertahap. Namun, pada 2020–2021 kemiskinan meningkat signifikan dari 11,70% menjadi 12,80% akibat kontraksi ekonomi selama pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata, pendidikan, dan jasa. Pembatasan aktivitas menyebabkan PHK, pengurangan jam kerja, dan penurunan pendapatan, terutama bagi pekerja informal, sehingga banyak rumah tangga rentan jatuh miskin meskipun inflasi relatif terkendali.

Pada periode 2022–2024, kemiskinan kembali menurun seiring pemulihan ekonomi pascapandemi, tetapi laju penurunannya relatif lambat. Pemulihan yang

belum merata, tekanan biaya hidup, serta dominasi sektor jasa berproduktivitas menengah membuat peningkatan pendidikan belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan. Secara keseluruhan, kemiskinan di DI Yogyakarta selama 2010–2024 bersifat fluktuatif dan sensitif terhadap guncangan ekonomi. Kemiskinan menurun saat pertumbuhan stabil dan inflasi terkendali, tetapi meningkat ketika terjadi perlambatan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau krisis, karena penurunan pendapatan tidak mampu diimbangi pemenuhan kebutuhan dasar.

Fenomena kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta selama periode 2010-2024 bersifat fluktuatif dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Kemiskinan menurun ketika pertumbuhan ekonomi stabil dan inflasi terkendali, tetapi meningkat saat terjadi perlambatan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan krisis seperti pandemi COVID-19. Mekanismenya terjadi ketika penurunan pendapatan masyarakat tidak mampu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kelompok rentan mudah jatuh miskin.

Pada Provinsi Bangka Belitung, terlihat bahwa kemiskinan mengalami tren penurunan pada periode 2010 hingga 2013. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung sedang dalam perbaikan pasca krisis keuangan global 2008 hingga 2009. Kinerja sektor pertambangan timah serta perkebunan kelapa sawit dan lada menjadi penopang utama pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat bahwa sektor pertambangan, penggalian, dan pertanian memberikan kontribusi besar terhadap PDRB sehingga mampu menekan kemiskinan. Program perlindungan sosial seperti Raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) juga turut memperkuat daya tahan rumah tangga miskin. Namun, pada periode 2014–2015 kemiskinan kembali

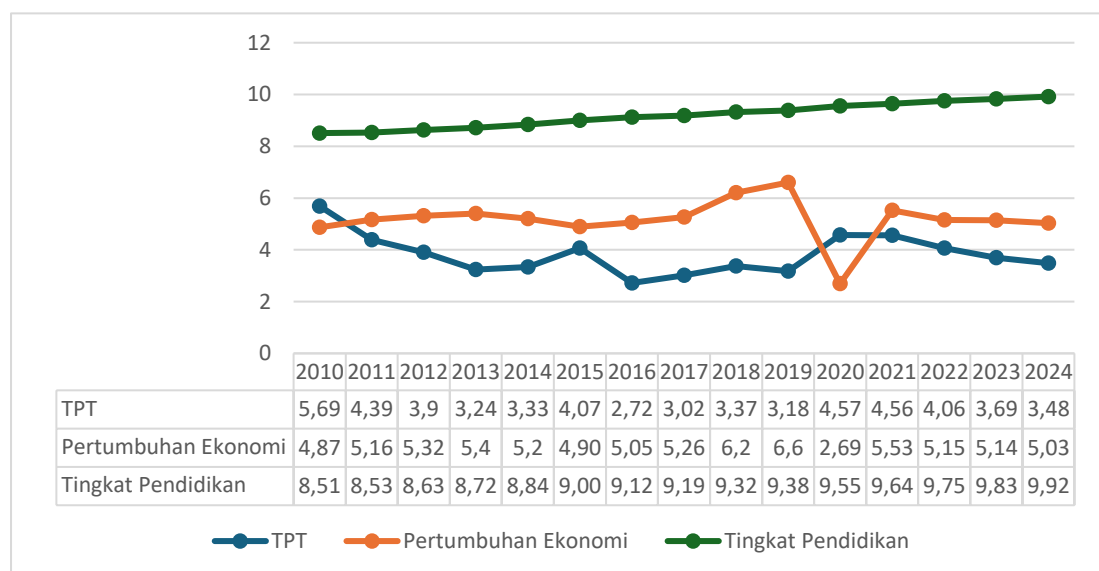
meningkat akibat turunnya harga timah dunia pada 2013–2014 karena melemahnya permintaan global, serta dampak reformasi subsidi BBM akhir 2014 yang memicu inflasi dan kenaikan biaya hidup (Bank Indonesia, 2015).

Pada periode 2016–2020, kemiskinan kembali menurun dan relatif stabil seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Pemerintah daerah melalui RPJMD 2017–2022 mendorong diversifikasi ekonomi ke sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada timah. Penurunan kemiskinan tahun 2019–2020 masih mencerminkan kondisi awal tahun sebelum dampak penuh pandemi COVID-19, karena data BPS didasarkan pada Susenas Maret. Namun, pada 2021 kemiskinan meningkat akibat pembatasan aktivitas selama pandemi yang melemahkan sektor pertambangan, perdagangan, dan pariwisata, serta memperburuk kondisi pasar tenaga kerja melalui pengurangan jam kerja dan peningkatan pekerja informal.

Pada periode 2022–2024, kemiskinan kembali menurun seiring pemulihan ekonomi dan pencabutan pembatasan mobilitas. BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka mulai menurun sejak 2022 karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, jasa, dan sektor berbasis sumber daya alam. Secara keseluruhan, kemiskinan di Bangka Belitung selama 2010–2024 bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas, terutama timah dan perkebunan. Kemiskinan menurun ketika aktivitas ekonomi dan harga komoditas membaik, tetapi meningkat saat terjadi penurunan harga, tekanan inflasi, atau krisis seperti pandemi, karena penurunan pendapatan dan kenaikan biaya hidup melemahkan daya beli rumah tangga.

Fenomena kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010-2024 bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh sektor berbasis sumber daya alam, terutama pertambangan timah dan perkebunan. Kemiskinan menurun saat harga komoditas dan aktivitas ekonomi membaik, namun meningkat ketika terjadi penurunan harga timah, tekanan inflasi akibat kebijakan BBM, serta krisis pandemi Covid-19. Mekanismenya terjadi ketika pendapatan masyarakat menurun sementara biaya hidup meningkat, sehingga daya beli melemah dan rumah tangga rentan mudah jatuh ke dalam kemiskinan.

Grafik 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2024



Sumber : BPS, 2026 (data diolah)

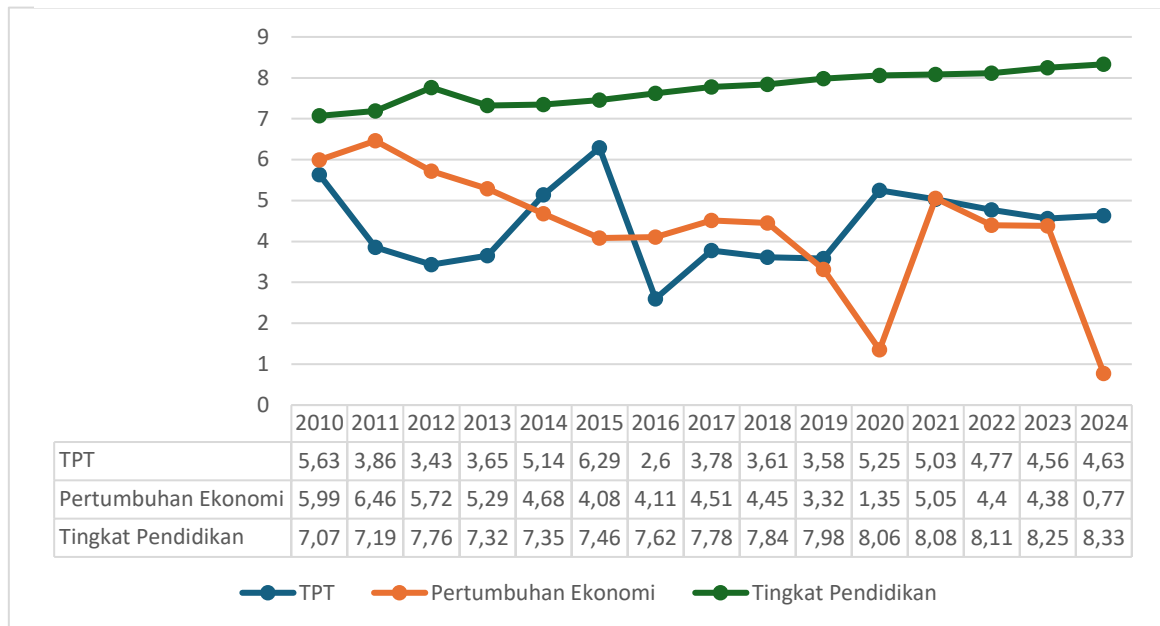
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakter ekonomi yang khas, dengan tingkat ketimpangan pendapatan relatif tinggi namun Tingkat Pengangguran Terbuka yang rendah dan stabil. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka DI Yogyakarta selama 2010–2024 cenderung berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 4,91% pada tahun 2024. Sebagian besar angkatan kerja terserap di sektor jasa, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata.

Namun, rendahnya pengangguran tidak otomatis berarti rendahnya kemiskinan, karena banyak tenaga kerja bekerja di sektor informal dan berupah rendah. Penelitian menunjukkan bahwa pengangguran memang berpengaruh positif terhadap kemiskinan, tetapi di daerah dengan dominasi pekerjaan informal, dampaknya sering terjadi melalui rendahnya upah dan tingginya kerentanan pendapatan (Setyanti dkk.,2024). Dari sisi pertumbuhan, ekonomi DIY relatif stabil kecuali saat pandemi COVID-19, dan studi menunjukkan bahwa pertumbuhan yang inklusif berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (Pardita dkk.,2024).

DI Yogyakarta juga memiliki keunggulan dalam pendidikan dengan tren peningkatan yang konsisten dan peran sebagai pusat pendidikan nasional. Pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas dan peluang kerja, sehingga membantu menurunkan kemiskinan (Susanto and Udjianto, 2019). Sebagai daerah yang dikenal sebagai pusat pendidikan, peningkatan pendidikan dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan meningkatkan pendapatan. Di DIY, tingginya tingkat pendidikan didukung oleh berkembangnya sektor jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang mampu memanfaatkan tenaga kerja berpendidikan.

Fenomena di DI Yogyakarta menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, atau pendidikan secara terpisah, melainkan oleh interaksi kompleks ketiganya. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa DI Yogyakarta tetap menghadapi tantangan kemiskinan meskipun memiliki tingkat pengangguran rendah dan pendidikan relatif tinggi, sekaligus memperlihatkan karakteristik daerah dengan ketimpangan yang tinggi.

Grafik 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010-2024



Sumber : BPS, 2026 (data diolah)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode 2010–2024, kondisi ekonomi Bangka Belitung menunjukkan pola yang fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka sempat menurun hingga 2016, kemudian kembali berfluktuasi, terutama setelah pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor primer seperti pertambangan timah dan perkebunan sawit, sehingga rentan terhadap perubahan harga komoditas dan kondisi global. Perlambatan tajam terjadi pada 2018–2020 akibat melemahnya harga timah dan dampak pandemi, lalu sempat pulih pada 2021 karena efek pemulihan dan peningkatan belanja pemerintah, sebelum kembali melemah pada 2023–2024. Penelitian menunjukkan bahwa di daerah yang bergantung pada sektor rentan, pengangguran dan dominasi pekerjaan informal dapat meningkatkan risiko kemiskinan karena pendapatan yang tidak stabil (Rama, Putri and Mynbayeva, 2025).

Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat Bangka Belitung terus meningkat selama 2010–2024. Dalam publikasi *Human Development Report* oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), peningkatan pendidikan diharapkan mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Aldi Firmansyah and Diena Khairunnisa, 2023). Namun, peningkatan pendidikan belum sepenuhnya diikuti transformasi struktur ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan secara optimal. Keterbatasan sektor industri dan jasa modern membuat sebagian tenaga kerja tetap berada di sektor informal atau primer berproduktivitas rendah. Dengan demikian, meskipun ketimpangan pendapatan relatif rendah, Bangka Belitung tetap menghadapi kerentanan ekonomi yang tinggi akibat ketergantungan pada sektor primer serta interaksi antara fluktuasi pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan keterbatasan penyerapan tenaga kerja berpendidikan.

Fenomena di Bangka Belitung menggambarkan daerah dengan ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah, namun dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi akibat ketergantungan pada sektor primer. Interaksi antara fluktuasi pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan peningkatan pendidikan yang belum sepenuhnya terserap pasar kerja menjadi faktor penting dalam menjelaskan dinamika kemiskinan Bangka Belitung.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam studi kemiskinan di Indonesia. Meskipun banyak penelitian menganalisis pengangguran, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, hasilnya sering berbeda antarwilayah

sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual. Selain itu, sebagian besar studi menggunakan data panel atau analisis nasional agregat, sedangkan penelitian yang membandingkan dua wilayah spesifik dengan regresi *time series* terpisah masih terbatas. Belum banyak kajian yang secara langsung membahas karakteristik wilayah dengan ketimpangan tinggi seperti DI Yogyakarta dan wilayah dengan ketimpangan rendah seperti Bangka Belitung dalam konteks kemiskinan.

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bangka Belitung” bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis kemiskinan sebagai variabel dependen menggunakan regresi *time series* pada masing-masing provinsi. Hasil dari kedua wilayah kemudian dibahas untuk menganalisis kemiskinan dalam kedua wilayah. Penelitian ini penting dilakukan, terutama pascapandemi, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan sesuai dengan karakteristik ketimpangan masing-masing wilayah.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY selama periode 2010-2024?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY selama periode 2010–2024?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY selama periode 2010–2024?
4. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010–2024?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010–2024?
6. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010–2024?
7. Apakah terdapat perbedaan pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan antara Provinsi DIY dan Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam mengenai fungsi tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan sebagai faktor penyebab kemiskinan, terutama dalam konteks ketimpangan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur dengan memberikan bukti empiris mengenai bagaimana ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan di dua provinsi yang memiliki ciri

ekonomi, sosial, dan demografis yang berbeda yaitu provinsi D.I.Yogyakarta dan provinsi Bangka Belitung, seperti :

1. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY selama periode 2010–2024.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY selama periode 2010–2024.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY selama periode 2010–2024.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010–2024.
5. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010–2024.
6. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung selama periode 2010–2024.
7. Menilai perbedaan hasil analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan antara Provinsi DIY dan Provinsi Bangka Belitung.

1.4.Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi analisis pada kemiskinan sebagai variabel dependen dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen. Studi dilakukan pada Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan data *time series* tahunan periode 2010–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah regresi *time series* sederhana (OLS) yang

dianalisis secara terpisah untuk masing-masing provinsi, kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan mekanisme dan pengaruh determinan kemiskinan antarwilayah. Penelitian ini berfokus pada pendekatan ekonomi makro dan sosial, sehingga tidak membahas faktor lain seperti infrastruktur, kebijakan fiskal, demografi, atau kelembagaan, serta tidak menguraikan secara rinci program penanggulangan kemiskinan daerah. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian tetap terarah pada analisis hubungan antara TPT, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan dalam menjelaskan disparitas kemiskinan di kedua provinsi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan, khususnya terkait kemiskinan dan disparitas antarwilayah. Studi ini menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan terhadap kemiskinan tidak bersifat universal, tetapi bergantung pada karakteristik struktural masing-masing daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini relevan sebagai dasar analisis determinan kemiskinan di DI Yogyakarta dan Kepulauan Bangka Belitung, baik untuk kepentingan akademik maupun kebijakan, seperti :

1. Untuk Pemerintah Daerah (DI Yogyakarta dan Bangka Belitung)

Penelitian ini memberikan informasi berbasis data untuk merancang kebijakan yang lebih tepat, seperti peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi prioritas.

2. Untuk Pemerintah Pusat

Temuan ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap perbedaan kondisi daerah,

termasuk strategi pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

3. Untuk Lembaga Perencanaan dan Pengentasan Kemiskinan

Untuk Lembaga seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Organisasi non pemerintah. Hasil penelitian ini dapat membantu menentukan program yang lebih tepat sasaran serta mengevaluasi kebijakan yang berjalan.

4. Untuk Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan studi lebih lanjut mengenai hubungan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan dalam konteks perbandingan antarwilayah.